

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 26 No. 4 (2025): October

DOI: 10.21070/ijins.v26i4.1824

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement.....	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright  Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 26 No. 4 (2025): October
DOI: 10.21070/ijins.v26i4.1824

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Indonesian Journal of Innovation Studies

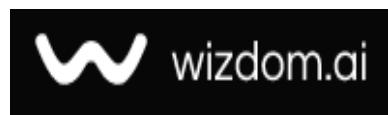
Vol. 26 No. 4 (2025): October
DOI: 10.21070/ijins.v26i4.1824

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Teachers' Perspectives on Inclusive Education Practices in East Kutai Regency

Persepsi Guru tentang Praktik Pendidikan Inklusif di Kabupaten Kutai Timur

Vinsensius Susanto Baga, vinsensiussusanto.2024@student.uny.ac.id, (1)

Program Studi Magister Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Sukinah, sukinah@uny.ac.id, ()

Program Studi Magister Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

Background: Inclusive education is a national mandate requiring schools to provide equitable learning opportunities for all students. **Specific background:** In East Kutai Regency, schools are transitioning toward inclusive practices despite structural and resource limitations. **Knowledge gap:** Limited empirical evidence exists regarding teachers' perspectives as key actors in implementing inclusive education in this region. **Aims:** This study investigates teachers' perceptions of conceptual understanding, school readiness, supporting and limiting factors, personal competencies, and expectations for inclusive education development. **Results:** Findings show that teachers hold positive conceptual awareness but report insufficient facilities, limited special education personnel, high administrative workload, and gaps in practical competencies, particularly in designing individualized learning programs. Training participation is strongly associated with higher levels of readiness, confidence, and use of supportive strategies. **Novelty:** This study integrates multilevel analysis of teachers' perceptions based on training, experience, and institutional conditions within a geographically diverse district. **Implications:** Strengthening continuous professional development, improving support services, and enhancing policy consistency are essential to advancing inclusive education implementation across East Kutai.

Highlights

- Teachers show strong conceptual understanding but face limited structural support.
- Training emerges as the most influential factor shaping teacher preparedness.
- Schools require better facilities, personnel, and policy alignment to sustain inclusivity.

Keywords

Inclusive Education, Teacher Perspectives, School Readiness, Educational Services, Learning Support

Published date: 2025-12-03

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu tanpa memandang latar belakang, kemampuan fisik, kondisi sosial ekonomi, maupun kebutuhan khusus yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan kebijakan dan praktik pendidikan yang menempatkan Konsep pendidikan ini menekankan pentingnya menghargai setiap perbedaan serta menyediakan akses dan peluang belajar yang adil bagi seluruh siswa [1]. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif sudah diamanatkan melalui berbagai regulasi, termasuk Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Aturan utama penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70/2009. Setiap kabupaten/kota wajib memilih minimal satu SD dan satu SMP di setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Guru di sekolah inklusif berhak mengikuti pelatihan. Pemerintah wajib menyediakan dana, infrastruktur, dan tenaga pendukung. Permendiknas ini menjadi rujukan teknis yang langsung memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan.

Hal ini didukung juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2023 tentang peningkatan inklusivitas pendidikan menengah, setiap sekolah harus memperlakukan semua siswa secara setara. Masih banyak permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Misalnya, kurangnya guru, fasilitas yang kurang memadai, dan sekolah serta masyarakat belum sepenuhnya memahami atau mempersiapkan diri. Di Kabupaten Kutai Timur, daerah yang masih berupaya meningkatkan mutu sekolahnya, beberapa sekolah telah mulai menerapkan kebijakan pendidikan inklusif. Namun, keberhasilan penerapan pendidikan inklusif sangat bergantung pada bagaimana guru memandang, memahami, dan mempersiapkannya. Guru adalah pemimpin proses pembelajaran di kelas. Keberhasilan program ini bergantung pada bagaimana guru, kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik memandang pendidikan inklusif. Persepsi positif dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi, sedangkan persepsi negatif atau kurangnya pemahaman berpotensi menjadi hambatan serius [2].

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi positif pendidikan inklusif para pemangku kepentingan tidak hanya guru namun juga pemerintah daerah terkait dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi pembelajaran yang ramah bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Berikut beberapa di antaranya: Dalam Netizens.id dan Sangattaku.com diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan inklusif dengan program strategis seperti peningkatan kapasitas guru melalui pendidikan S2 inklusi dan penyesuaian fasilitas pendukung di sekolah umum. Program ini bertujuan menjangkau anak berkebutuhan khusus di wilayah terpencil yang sulit mengakses Sekolah Luar Biasa (SLB). Ratusan guru didesak untuk mendapatkan pelatihan formal agar setiap sekolah negeri siap membantu siswa berkebutuhan khusus. Studi kasus di SMPN 1 Sangatta Utara menunjukkan bahwa wilayah ini masih berupaya menerapkan pendidikan inklusif. Sekolah ini merupakan proyek percontohan untuk siswa SMP. Model yang diadopsi berfokus pada pertumbuhan sosial dan pribadi siswa, yang mencakup pembelajaran di kelas khusus dan pendekatan pendampingan yang kuat. Namun, pelaksanaan tetap menghadapi tantangan seperti adaptasi kurikulum dan kesiapan sumber daya manusia [3]. Penelitian pada SD YPPSB dan SDN 004 Inklusi Sangatta menemukan bahwa guru mengadopsi strategi pembelajaran adaptif menggunakan pendekatan visual dan pengalaman langsung untuk siswa autis. Hasilnya, anak-anak tidak hanya mendapat pemahaman akademis tetapi juga terjadi peningkatan keterampilan sosial dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran [4].

Di Kabupaten Kutai Timur, penerapan pendidikan inklusif sulit karena kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), sarana dan prasarana yang kurang baik, serta manajemen sekolah dan kebijakan daerah yang belum siap. Penting untuk mengetahui bagaimana perasaan guru tentang pendidikan inklusif agar kebijakan dapat lebih baik untuk daerah tersebut dan guru dapat menjadi lebih baik. Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang luas dengan berbagai jenis lahan. Kabupaten Kutai Timur berada di provinsi ini. Ada banyak masalah dalam penerapan pendidikan inklusif di daerah ini. Tidak cukup guru, ruang kelas, atau guru yang mengetahui tentang ide dan praktik pendidikan inklusif, misalnya. Guru bertanggung jawab atas apa yang dipelajari siswa di sekolah, dan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar. Sikap guru terhadap pendidikan inklusif akan secara signifikan memengaruhi perilaku, metode pengajaran, dan interaksi mereka dengan siswa berkebutuhan khusus.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif guru di Kabupaten Kutai Timur mengenai konsep dan prinsip pendidikan inklusif, kesiapan lembaga mereka untuk implementasinya, faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasinya, dan aspirasi mereka untuk kebijakan dan pelatihan di masa depan yang dapat meningkatkan pendidikan. Hasil studi ini diharapkan dapat membantu Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan program pelatihan guru dan kebijakan untuk pendidikan inklusif. Penelitian telah menunjukkan bahwa persepsi pendidik tentang pendidikan inklusif dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan mereka, pengalaman mengajar, pelatihan sebelumnya, dukungan kelembagaan, dan konteks sosiokultural yang berlaku. Guru akan lebih mungkin untuk memunculkan ide-ide baru dan cara-cara yang lebih baik untuk mengajar jika mereka memiliki pemikiran positif tentang pendidikan inklusif. Di sisi lain, pikiran negatif dapat mempersulit penerapan pendidikan inklusif. Pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Timur menginginkan sekolah-sekolah reguler untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Beberapa sekolah dapat berubah dengan mudah, tetapi banyak di antaranya kesulitan menyediakan layanan mereka untuk semua orang. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana persepsi guru-guru di daerah tersebut terhadap kebijakan dan praktik

pendidikan inklusif yang sedang dijalankan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Menurut Rukminingsih [6], pendekatan kuantitatif berfokus pada pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini membantu peneliti memahami perspektif guru tentang pendidikan inklusif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat implementasinya. Penelitian survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari para pendidik di sekolah-sekolah inklusif di Kutai Timur menggunakan instrumen standar, termasuk kuesioner. Susanti [7] menyatakan bahwa penelitian survei merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi hubungan, pola, dan tren di antara berbagai elemen dalam pendidikan. Misalnya, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana perasaan guru tentang kebijakan inklusif dan seberapa siap mereka untuk mengajar di kelas yang terbuka untuk semua orang. Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan melihat sekolah dasar dan menengah yang telah dipilih pemerintah daerah untuk menjadi sekolah yang menawarkan pendidikan inklusif. Subjek penelitian ini adalah semua guru yang bekerja di pendidikan inklusif dan sekolah reguler di Kabupaten Kutai Timur, meliputi guru reguler dan guru asisten khusus (GPK). Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yang berarti bahwa subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang penting untuk tujuan penelitian. Kriteria sampel meliputi: (1) pendidik yang saat ini bekerja atau sebelumnya terlibat dalam pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah pertama, dan atas; (2) pendidik yang memiliki pengalaman langsung dengan siswa berkebutuhan khusus; dan (3) pendidik yang siap mengisi kuesioner. Dari kelompok ini, 100 guru dipilih sebagai sampel. Kelompok ini mencakup guru tetap dan guru asisten khusus untuk memastikan bahwa kedua peran tersebut terwakili secara memadai. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data utama berupa kuesioner untuk mendukung pendekatan kuantitatif, dengan tambahan observasi untuk melengkapi data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statistik. Menurut Sugiyono [8], analisis data kuantitatif melibatkan pengolahan data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini telah berhasil dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2025 di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Fokus penelitian adalah mengkaji persepsi guru-guru terhadap implementasi pendidikan inklusif, yang merupakan isu strategis dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di daerah tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan survei kuantitatif dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah divalidasi, serta observasi langsung di kelas-kelas inklusif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Terdapat 100 guru dari 15 sekolah di Kabupaten Kutai Timur yang menawarkan pendidikan inklusif. Mereka mengajar pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Kalimantan Timur, memiliki permasalahan tersendiri dalam penerapan pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh banyaknya sekolah dan kondisi geografis daerah tersebut, serta latar belakang sosial ekonomi masyarakat. Tingkat responsnya adalah 100%, yang berarti para guru sangat bersemangat untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa para guru mengetahui dan peduli terhadap isu-isu terkait pendidikan inklusif, meskipun mereka tidak semua memahaminya atau siap untuk menghadapinya dengan cara yang sama.

Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan observasi awal penelitian, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kutai Timur telah dimulai dengan penunjukan beberapa sekolah sebagai pilot project. Pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk alokasi anggaran khusus dan program pelatihan guru sebagaimana disebutkan dalam latar belakang penelitian ini. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang akan diungkap melalui hasil penelitian ini, sesuai dengan temuan awal yang mendorong dilakukannya penelitian mendalam tentang persepsi guru. Instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.847 (sangat reliabel). Proses pengumpulan data dilakukan dengan bantuan langsung untuk menjamin kualitas respons dan mengurangi bias. Selanjutnya, kami menggunakan SPSS versi 25 dan sejumlah metode statistik deskriptif dan inferensial untuk menganalisis data. Temuan penelitian ini diharapkan dapat secara akurat menggambarkan kondisi implementasi pendidikan inklusif di Kutai Timur saat ini dan memberikan landasan bagi perumusan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian disusun secara sistematis, dimulai dengan karakteristik responden, kemudian dilanjutkan dengan analisis persepsi di lima area utama: pemahaman konseptual, kesiapan sekolah, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat, keterampilan pribadi, dan ekspektasi perkembangan. Setelah itu, ada korelasi antara variabel dan analisis mendalam berdasarkan karakteristik demografi responden. Setiap temuan disertai dengan interpretasi statistik dan implikasi praktisnya untuk implementasi pendidikan inklusif di lapangan.

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	28%
	Perempuan	72	72%
Jenjang Sekolah	PAUD	26	26%

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 26 No. 4 (2025): October

DOI: 10.21070/ijins.v26i4.1824

	SD	53	53%
	SMP	15	15%
	SMA	6	6%
Jabatan	Guru Kelas/Mapel	86	86%
	Kepala Sekolah	13	13%
	GPK	1	1 %
Pelatihan Inklusif	Pernah	62	62%
	Belum Pernah	38	38%

Table 1. Karakteristik Responden

Berdasarkan data table 1. mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (72%), sementara laki-laki hanya 28%. Mayoritas guru (53%) bekerja di tingkat sekolah dasar, diikuti oleh sekolah menengah pertama (15%), pendidikan anak usia dini (PAUD) (26%), dan sekolah menengah atas (6%). Mayoritas guru (86%) adalah guru kelas atau guru mata pelajaran. Hanya 1% yang merupakan guru asisten khusus dan 13% adalah kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak staf khusus di sekolah inklusif. Enam puluh dua persen guru telah menerima pelatihan pendidikan inklusif, sementara dua puluh delapan persen belum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru di Kutai Timur siap menggunakan pendidikan inklusif.

Variabel	Pemahaman Konsep	Kesiapan Sekolah	Faktor Pendukung	Kompetensi Pribadi
Pemahaman Konsep	1.000	0.456**	0.623**	0.578**
Kesiapan Sekolah	0.456**	1.000	0.389*	0.445**
Faktor Pendukung	0.623**	0.389*	1.000	0.512**
Kompetensi Pribadi	0.578**	0.445**	0.512**	1.000

Keterangan: ** Signifikan pada level 0.01, * Signifikan pada level 0.05

Table 2. Analisis Korelasi Antar Variabel

Hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan terkuat ada pada aspek pemahaman konsep – faktor pendukung ($r = 0.623$), artinya pemahaman guru menjadi kunci dalam memanfaatkan dukungan yang tersedia. Semua hubungan antar variabel bersifat positif dan signifikan, menandakan bahwa peningkatan satu aspek akan diikuti peningkatan aspek lainnya. Implikasi praktis: Program pengembangan guru perlu menyeimbangkan peningkatan pemahaman konsep, penyediaan faktor pendukung, dan penguatan kesiapan sekolah, karena ketiganya saling berkaitan erat dengan kompetensi pribadi guru.

Aspek	Sudah Pelatihan (n=45)	Belum Pelatihan (n=55)	t-test	Sig.
Pemahaman Konsep	4.12	3.58	3.456	0.001**
Kesiapan Sekolah	3.05	2.60	2.234	0.028*
Faktor Pendukung	4.25	3.70	3.789	0.000**
Kompetensi	3.35	2.55	4.123	0.000**

Pribadi				
---------	--	--	--	--

Table 3. Perbandingan Persepsi Guru Berdasarkan Pengalaman Pelatihan

Semua aspek menunjukkan perbedaan signifikan antara guru yang sudah mengikuti pelatihan dan yang belum. Dampak pelatihan paling tinggi terlihat pada kompetensi pribadi dan faktor pendukung, sedangkan kesiapan sekolah meskipun signifikan, memiliki selisih rata-rata yang lebih kecil. Implikasi: Peningkatan intensitas dan kualitas pelatihan sangat direkomendasikan untuk memperkuat seluruh aspek kompetensi guru, terutama bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif.

Aspek	1-5 tahun	6-10 tahun	>10 tahun	ANOVA
Pemahaman Konsep	3.65	3.88	3.92	2.145
Kesiapan Sekolah	2.85	2.78	2.78	0.089
Faktor Pendukung	3.78	4.02	4.05	1.876
Kompetensi Pribadi	2.65	2.98	3.08	3.234

Table 4. Perbandingan Persepsi Berdasarkan Pengalaman Mengajar

Perbandingan Persepsi Berdasarkan Pengalaman Mengajar Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa secara umum, perbedaan pengalaman mengajar (1–5 tahun, 6–10 tahun, dan >10 tahun) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sebagian besar aspek persepsi guru dalam implementasi pendidikan inklusif, kecuali pada aspek kompetensi pribadi. Lama pengalaman mengajar berkorelasi positif dengan peningkatan kompetensi pribadi guru, namun tidak berpengaruh nyata terhadap pemahaman konsep, persepsi kesiapan sekolah, maupun penilaian faktor pendukung. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti pelatihan formal, dukungan kebijakan, dan sarana prasarana lebih berperan dalam membentuk persepsi guru dibanding sekadar lamanya pengalaman mengajar.

Faktor pendukung utama yang ditemukan pada penelitian ini ialah komitmen dan dukungan kepala sekolah (78% responden), Pelatihan dan workshop pendidikan inklusif (65% responden), Kerjasama dengan orang tua PDBK (52% responden), Dukungan dari guru senior berpengalaman (48% responden) dan Kebijakan daerah yang mendukung (35% responden). Analisis Faktor Pendukung Utama Implementasi Pendidikan Inklusif Berdasarkan hasil temuan, terdapat lima faktor kunci yang paling sering disebut oleh responden sebagai pendorong keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah:

1. Komitmen dan Dukungan Kepala Sekolah (78%): Persentase tertinggi menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah menjadi penentu utama keberhasilan program. Kepala sekolah yang memiliki visi inklusif, menyediakan fasilitas, serta mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensinya menciptakan iklim sekolah yang mendukung penerimaan dan pembelajaran PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus).
2. 65% guru menyatakan bahwa pelatihan adalah cara terbaik untuk membangun kapasitas. PDBK belajar tentang ide, berbagai cara belajar, dan cara menangani perilaku yang tepat bagi mereka melalui kegiatan-kegiatan ini. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan memiliki skor persepsi yang lebih tinggi.
3. Bekerja dengan Orang Tua PDBK (52%): Membantu orang tua sangat penting untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan antara sekolah dan rumah. Kemitraan ini mencakup komunikasi rutin, memastikan strategi pembelajaran yang sama, dan keterlibatan orang tua dalam program sekolah.
4. Bantuan dari Guru Senior yang Berpengalaman (48%): Guru senior dapat menjadi sumber inspirasi dan bantuan bagi guru yang baru mengenal PDBK. Mereka membantu orang lain berbagi pengalaman nyata, memberikan nasihat tentang cara menghadapi situasi sulit, dan memberi contoh tentang cara untuk lebih menerima.
5. Kebijakan Daerah yang Mendukung (35%): Kebijakan daerah merupakan bagian yang paling tidak penting, tetapi tetap sangat penting untuk memastikan semua orang dapat bersekolah. Dengan adanya aturan yang jelas, alokasi dana, dan bantuan dari pengawas, sekolah dapat menawarkan program yang lebih inklusif.

Sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekolah, terutama kepala sekolah dan guru yang bekerja sama dengan mereka. Peningkatan keterampilan guru juga sangat penting, karena hal ini berdampak langsung pada keberhasilan pembelajaran inklusif. Faktor eksternal, seperti dukungan dari kebijakan daerah, dapat membantu hal ini dan membuat program lebih berkelanjutan.

B. Kendala utama dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Adanya keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana (85% responden), kurangnya GPK dan tenaga ahli (78% responden), beban administrasi yang berlebihan (72% responden), kurangnya pelatihan khusus pendidikan inklusif (68% responden) dan resistensi dari sebagian orang tua siswa reguler (45% responden). Berdasarkan hasil temuan, terdapat lima kendala dominan yang dihadapi guru dan sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif:

1. Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana (85% responden)

Kendala ini menjadi hambatan paling tinggi. Banyak sekolah belum memiliki ruang belajar yang ramah ABK, alat bantu pembelajaran, serta aksesibilitas fisik yang memadai. Hal ini berdampak pada efektivitas pembelajaran dan kenyamanan PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus).

2. Kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan tenaga ahli (78% responden)

Minimnya ketersediaan GPK menyebabkan beban penanganan PDBK sepenuhnya berada di pundak guru kelas atau mata pelajaran yang belum tentu memiliki kompetensi khusus. Kekurangan tenaga ahli seperti terapis okupasi, terapis wicara, atau psikolog sekolah juga membatasi intervensi yang optimal.

3. Beban administrasi yang berlebihan (72% responden)

Guru seringkali menghabiskan banyak waktu untuk tugas administrasi seperti pembuatan RPP, laporan perkembangan, dan pelaporan ke pihak dinas. Hal ini mengurangi waktu yang dapat digunakan untuk menyiapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan individu PDBK.

4. Kurangnya pelatihan khusus pendidikan inklusif (68% responden)

Pelatihan yang minim membuat guru kurang percaya diri dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dan manajemen kelas inklusif. Padahal, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar guru mampu mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa.

5. Resistensi dari sebagian orang tua siswa reguler (45% responden)

Sebagian orang tua khawatir keberadaan PDBK akan mengganggu pembelajaran anak mereka atau menurunkan prestasi akademik kelas. Persepsi negatif ini dapat memengaruhi dukungan terhadap program inklusif di sekolah.

Data ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar terletak pada faktor sumber daya dan dukungan struktural, bukan hanya pada sikap guru atau masyarakat. Keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga pendukung teknis menjadi penghalang utama. Namun, kendala sosial berupa resistensi orang tua reguler tetap perlu diperhatikan, karena dapat memengaruhi iklim inklusif di sekolah.

C. Harapan Implementasi Pendidikan Inklusif

Data menunjukkan adanya harapan dalam implementasi pendidikan inklusif perlu ada peningkatan fasilitas dan aksesibilitas sekolah (82% responden), Pelatihan rutin dan berkelanjutan untuk guru (78% responden), Penambahan jumlah GPK (75% responden), Penyediaan modul dan media pembelajaran khusus (68% responden), Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (62% responden). Berdasarkan hasil survei, sebagian besar guru memiliki harapan yang kuat terhadap peningkatan kualitas dan keberlanjutan implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Data menunjukkan bahwa:

1. Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas sekolah (82% responden) menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana fisik yang ramah untuk semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dianggap sangat krusial agar pembelajaran dapat berlangsung efektif dan setara.
2. Pelatihan rutin dan berkelanjutan untuk guru (78%) menjadi harapan besar berikutnya. Guru merasa perlu terus meningkatkan kompetensi pedagogik, adaptasi kurikulum, serta strategi pembelajaran diferensiasi agar mampu memberikan layanan yang optimal bagi PDBK.
3. Fakta bahwa kini terdapat 75% lebih banyak Guru Pembimbing Khusus (GPK) menunjukkan bahwa staf pendukung ini dipandang penting untuk membantu guru kelas dan mata pelajaran memenuhi kebutuhan setiap siswa.
4. Fakta bahwa 68% siswa menerima modul dan media pembelajaran khusus menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan materi pembelajaran yang lebih relevan, bermanfaat, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa di kelas inklusif.
5. Dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan dan anggaran (62%) merupakan faktor strategis yang diharapkan dapat memastikan bahwa pendidikan inklusif dilaksanakan secara berkelanjutan dan terukur.

Temuan ini menunjukkan bahwa guru memandang pendidikan inklusif lebih dari sekadar program; mereka melihatnya sebagai sebuah sistem yang membutuhkan banyak bantuan, mulai dari hal-hal fisik (seperti fasilitas), sumber daya manusia (seperti GPK dan pelatihan), perangkat pembelajaran (seperti modul dan media), serta dukungan kebijakan dan pendanaan. Fakta bahwa begitu banyak siswa berfokus pada fasilitas dan pelatihan menunjukkan dua hal: pertama, kita perlu membuat ruang belajar lebih mudah diakses, dan kedua, kita perlu memberi guru lebih banyak kekuasaan sebagai pelaku kunci di bidang ini.

D. Pembahasan

1. Persepsi Guru terhadap Konsep Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru di Kabupaten Kutai Timur memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep pendidikan inklusif dengan nilai rata-rata mean sebesar 3,82. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum, para guru telah memahami prinsip dasar pendidikan inklusif sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Temuan ini sejalan dengan penelitian Musyariifa dan Hendriani [11] yang menyatakan bahwa pemahaman konseptual merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan pendidikan inklusif. Jika masyarakat tidak benar-benar memahami apa itu pendidikan inklusif, mungkin pendidikan inklusif hanya sekadar formalitas yang tidak benar-benar mengubah cara siswa belajar di kelas. Namun, analisis data menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat terhadap arti pendidikan inklusif (mean = 3,93) dan pemahaman mereka tentang cara menggunakan diferensiasi pembelajaran (mean = 3,50). Diferensiasi pembelajaran merupakan strategi penting yang memungkinkan guru menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kebutuhan serta karakteristik peserta didik [12]. Perbedaan skor ini menandakan bahwa sebagian guru masih memerlukan penguatan dalam aspek praktis pelaksanaan pembelajaran adaptif.

Hal ini diperkuat oleh temuan UNESCO [13] yang menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam pendidikan inklusif di negara berkembang adalah transisi dari pemahaman konsep menuju kompetensi teknis dalam praktik pembelajaran. Guru mungkin memahami arti inklusivitas, tetapi mereka mungkin tidak tahu cara mengubah metode pengajaran, materi, dan tes mereka agar sesuai dengan kebutuhan seluruh siswa. Dalam situasi ini, pelatihan yang lebih spesifik tentang strategi pembelajaran adaptif sangat dibutuhkan. Florian dan Black-Hawkins [14] melakukan studi yang menunjukkan bahwa pendidik yang menjalani pelatihan terstruktur dalam strategi pembelajaran inklusif mampu mendorong kelas yang lebih partisipatif dan berorientasi pada keberagaman. Dengan demikian, rekomendasi yang dapat diajukan adalah pelaksanaan program pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, berfokus pada keterampilan praktis seperti diferensiasi, modifikasi kurikulum, dan penggunaan teknologi asistif.

2. Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kesiapan sekolah di Kabupaten Kutai Timur berada pada kategori rendah dengan rata-rata skor mean = 2.80. Indikator terendah terdapat pada ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) (mean = 2.56) dan sarana prasarana (mean = 2.65). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif, kesiapan struktural dan sumber daya masih belum memadai. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Nurwan [15] yang menemukan bahwa keterbatasan tenaga pendidik khusus dan sarana pembelajaran adaptif menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah daerah. Demikian pula, Sulthon [16] menegaskan bahwa tantangan terbesar implementasi pendidikan inklusif di Indonesia terletak pada minimnya infrastruktur yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) serta kurangnya tenaga pendidik terlatih. Kehadiran GPK sangat penting untuk memfasilitasi proses pembelajaran adaptif.

Fitriyah dan Nurani [17] menyatakan bahwa GPK menghubungkan guru kelas, orang tua, dan siswa berkebutuhan khusus serta membantu berbagai metode pembelajaran. Tanpa GPK, guru kelas reguler seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan semua siswanya. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, termasuk ruang yang tidak memadai untuk sumber daya, aksesibilitas fisik, dan materi pembelajaran khusus, menghambat implementasi pendidikan inklusif yang komprehensif. UNESCO [18] merekomendasikan bahwa sekolah inklusif harus dilengkapi dengan fasilitas yang dapat diakses semua siswa, termasuk ramp, toilet khusus, dan alat bantu pembelajaran adaptif. Implikasi temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur untuk memprioritaskan investasi pada infrastruktur sekolah yang ramah PDBK serta menambah jumlah GPK melalui rekrutmen maupun pelatihan ulang guru yang ada. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesiapan sekolah, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa inklusivitas merupakan prioritas kebijakan pendidikan daerah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan merupakan faktor pendukung terkuat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kutai Timur, dengan nilai rata-rata tertinggi (mean = 4.23). Temuan ini selaras dengan hasil analisis korelasi, di mana guru yang telah mengikuti pelatihan memiliki persepsi yang signifikan lebih positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan guru yang belum pernah mengikuti pelatihan ($p < 0.001$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan mampu memperkuat kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Hasil ini sejalan dengan temuan Florian & Black-Hawkins [19] yang menegaskan bahwa pelatihan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membekali guru dengan strategi pembelajaran diferensiasi, manajemen kelas inklusif, serta keterampilan asesmen yang responsif.

UNESCO [20] juga menekankan bahwa guru perlu membangun keterampilan mereka agar dapat melaksanakan pendidikan inklusif, terutama dengan memberikan pelatihan yang relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi di kelas. Di sisi

ISSN 2598-9936 (online), <https://ijins.umsida.ac.id>, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

lain, beban administratif dianggap sebagai masalah besar, dengan skor rata-rata yang tinggi (rata-rata = 4,03). Karena harus melakukan banyak pekerjaan administratif, seperti menulis laporan, membuat dokumen kurikulum, dan mengumpulkan data siswa, guru seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang baik. Yada dan Savolainen [21] menemukan bahwa beban kerja non-mengajar yang substansial dapat mengurangi konsentrasi guru pada interaksi pedagogis, sehingga menghambat pencapaian tujuan pendidikan inklusif. OECD (2020) juga mengatakan bahwa di banyak negara, seperti Indonesia, guru menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan administratif, yang merugikan kualitas pembelajaran dan bantuan yang dapat diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks Kutai Timur, hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan untuk mengefisiensikan prosedur administrasi atau menyediakan tenaga pendukung administratif di sekolah-sekolah inklusif.

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk:

- a. Memperluas cakupan dan frekuensi pelatihan guru tentang strategi pembelajaran adaptif, manajemen kelas inklusif, serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
- b. Mengurangi beban administratif guru dengan penyederhanaan prosedur atau dukungan tenaga administrasi tambahan, sehingga guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran.

4. Kompetensi Pribadi Guru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menilai kompetensi pribadi mereka berada pada kategori sedang (mean = 2,91), dengan kelemahan utama pada kemampuan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) (mean = 2,52). Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa meskipun guru memiliki pemahaman umum tentang pendidikan inklusif, mereka masih mengalami kesulitan dalam penerapan teknis yang memerlukan keterampilan khusus dan pengalaman praktis. Temuan ini menguatkan pernyataan Handayani bahwa kapasitas pendidik untuk mengembangkan PPI yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa secara signifikan memengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Handayani menekankan perlunya pelatihan yang berfokus pada keterampilan praktis, seperti simulasi pengembangan PPI, studi kasus, dan bimbingan langsung di kelas. Analisis korelasi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pengalaman mengajar dan keterampilan tutor privat ($p = 0,043$). Ini menunjukkan bahwa kecakapan guru dalam menggunakan strategi pembelajaran adaptif meningkat dengan meningkatnya pengalaman. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. [23], yang menunjukkan bahwa pendidik dengan pengalaman lebih dari lima tahun umumnya memiliki keterampilan pedagogis yang unggul, terutama dalam kerangka pendidikan inklusif.

Temuan-temuan ini menunjukkan keharusan untuk melakukan pendampingan sebaya dalam lembaga pendidikan, yang memungkinkan pendidik berpengalaman untuk memberikan bantuan teknis kepada guru-guru pemula, terutama dalam domain pengembangan PPI dan menilai kebutuhan belajar siswa. Pendekatan ini terbukti efektif menurut Subban & Sharma (2006) yang menemukan bahwa kolaborasi antar guru meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan dalam mengelola pembelajaran inklusif. Dengan demikian, intervensi strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah maupun sekolah meliputi: Pelatihan intensif berbasis praktik untuk penyusunan PPI. Program mentoring yang memfasilitasi transfer pengetahuan dari guru berpengalaman kepada guru baru. Penguatan komunitas belajar guru untuk saling berbagi praktik terbaik (best practices).

5. Harapan dan Kebutuhan Pengembangan Implementasi Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek harapan memperoleh skor tertinggi (mean = 4,28), mencerminkan motivasi tinggi guru untuk terus mengembangkan diri dalam konteks pendidikan inklusif. Tingginya skor ini mengindikasikan adanya kesiapan psikologis dan komitmen profesional dari guru untuk beradaptasi dan memperbaiki praktik pembelajaran, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan hambatan teknis di lapangan. Adapun tiga kebutuhan utama yang diidentifikasi guru meliputi:

- a. Pelatihan berkelanjutan (mean = 4,28): Guru menekankan pentingnya pelatihan yang dilakukan secara rutin dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan temuan Florian & Black-Hawkins (2011) yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh continuous professional development yang relevan dengan konteks kelas. Pelatihan yang berkelanjutan memungkinkan guru menguasai strategi diferensiasi pembelajaran, adaptasi kurikulum, serta keterampilan komunikasi dengan siswa berkebutuhan khusus [24].
- b. Kebijakan daerah yang spesifik (mean = 4,26): Skor tinggi ini menunjukkan bahwa guru membutuhkan seperangkat aturan yang jelas agar pendidikan lebih terbuka bagi semua orang. Tanpa aturan, guru seringkali tidak tahu apa yang harus diajarkan atau bagaimana melakukannya. Loreman, Deppeler, dan Harvey (2010) menyatakan bahwa kebijakan daerah tertentu memfasilitasi penyediaan sumber daya, pembagian peran, dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan inklusif.
- c. Modul dan media pembelajaran khusus (mean = 4,29): Guru mengetahui bahwa siswa berkebutuhan khusus membutuhkan materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Alquraini dan Gut (2012), yang menunjukkan bahwa penyediaan media pembelajaran adaptif secara signifikan meningkatkan kemungkinan partisipasi dan keberhasilan mereka.

Ada hubungan yang kuat antara pemahaman gagasan pendidikan inklusif dan faktor-faktor yang membantunya ($r = 0,623$, $p < 0,01$). Hal ini menunjukkan bahwa pendidik yang memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep inklusi lebih

[ISSN 2598-9936 \(online\)](https://doi.org/10.21070/ijins.v26i4.1824), <https://ijins.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](https://www.umsida.ac.id)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

terampil dalam mengidentifikasi, meningkatkan, dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusif. Temuan ini sejalan dengan Florian dan Black-Hawkins (2011), yang menggarisbawahi bahwa pemahaman teoretis yang kuat akan memengaruhi pengambilan keputusan guru terkait implementasi strategi inklusi di kelas. Korelasi positif yang diamati di seluruh dimensi (pemahaman konseptual, faktor pendukung, kompetensi pribadi, kesiapan sekolah, dan ekspektasi) menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan inklusif akan lebih efektif jika diimplementasikan melalui pendekatan holistik, alih-alih hanya berfokus pada satu aspek saja. Sharma, Forlin, dan Loreman (2008) menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi guru, dukungan kebijakan, infrastruktur, dan pelatihan berkelanjutan. Untuk membantu guru lebih memahami pendidikan inklusif, kita juga perlu meningkatkan hal-hal seperti pelatihan, fasilitas, kebijakan yang jelas, dan dukungan dari seluruh ekosistem sekolah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ainscow, Booth, dan Dyson (2006), pengembangan inklusif memerlukan sinergi antar aspek, di mana intervensi parsial hanya akan menghasilkan perubahan yang terbatas. Dengan demikian, strategi pengembangan pendidikan inklusif di Kutai Timur sebaiknya dirancang secara terpadu, mencakup peningkatan pengetahuan guru, optimalisasi fasilitas, dan penguatan regulasi yang mendukung.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap konsep pendidikan inklusif di Kutai Timur berada pada kategori positif, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, penerimaan keberagaman, dan pentingnya akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Persepsi guru terhadap kesiapan sekolah dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif berada pada kategori cukup siap. Sekolah telah menyediakan beberapa fasilitas dan kebijakan dasar, namun masih memerlukan penguatan dalam penyediaan sarana prasarana khusus, pelatihan intensif, dan dukungan kebijakan daerah yang lebih konkret. Persepsi guru terhadap kemampuan dan peran mereka dalam pembelajaran inklusif berada pada kategori sedang. Guru mengatakan bahwa mereka adalah fasilitator, motivator, dan perancang pembelajaran, tetapi mereka merasa kurang terampil, terutama dalam hal membuat Program Pembelajaran Individual (IEP) dan menggunakan media pembelajaran khusus. Persepsi guru dibentuk oleh pelatihan, pengalaman mengajar, dukungan kebijakan, akses ke media dan modul khusus, dan budaya sekolah yang inklusif. Hal yang paling membantu adalah pelatihan, dan yang paling sulit adalah beban administratif. Guru berpikir bahwa ada banyak masalah dengan pendidikan inklusif, seperti banyak dokumen, tidak cukup fasilitas khusus, tidak cukup sumber daya pendukung, tidak cukup kerja sama antara pemangku kepentingan, dan kebijakan regional yang tidak sepenuhnya mendukung pendidikan inklusif. Guru ingin membuat pendidikan lebih baik dengan memberi mereka lebih banyak pelatihan berdasarkan keterampilan dunia nyata, dukungan yang lebih jelas dari kebijakan regional, modul dan media pembelajaran khusus, dan sistem bagi guru senior untuk membantu guru junior. Sehingga disarankan untuk pemerintah daerah agar menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas pembelajaran inklusif seperti alat bantu, ruang sumber, dan teknologi pendukung. Menetapkan kebijakan pengangkatan dan penempatan GPK di setiap sekolah penyelenggara inklusi. Untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah agar dapat menyelenggarakan pelatihan rutin yang berfokus pada praktik pembelajaran, asesmen, dan penyusunan PPI. Membentuk team teaching yang melibatkan guru reguler dan GPK untuk mendukung anak berkebutuhan khusus di kelas. Untuk Guru dapat meningkatkan keterampilan melalui self-learning, komunitas belajar guru, dan pelatihan daring tentang strategi pembelajaran inklusif. Mengoptimalkan kerja sama dengan orang tua untuk menindaklanjuti pembelajaran di rumah.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, kepala sekolah, serta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan penelitian ini.

References

1. M. Arif *et al.*, "Hambatan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2025.
2. A. Hafiz, "Dampak sosial dan psikologis pendidikan inklusif terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus," *Jurnal Pendidikan Khusus*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2017.
3. Mukhtar, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif: Studi Kasus di SMPN 1 Sangatta Utara," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 7, no. 2, pp. 56–68, 2019.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, *Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah*, 2023.
5. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif*, 2009.
6. R. Barokatin, "Strategi pembelajaran adaptif untuk siswa autis di SD YPPSB dan SDN 004 Inklusi Sangatta," *Jurnal Pendidikan Khusus*, vol. 6, no. 1, pp. 78–90, 2023.
7. Rukminingsih, A. Gunawan, and L. Mohammad, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Erlaka Utama, 2020.
8. U. Nadhiroh, "Konsep pendidikan inklusif: Menghargai perbedaan dalam pembelajaran," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, pp. 34–47, 2024.
9. "Targetkan guru inklusi di setiap sekolah, 450 guru dikuliahkan pemerintah," *Sangattaku.com*, 2025. [Online]. Available: <https://www.sangattaku.com/2025/05/targetkan-guru-inklusi-di-setiap-sekolah-450-guru-dikuliahkan-pemerintah/>
10. "Komitmen Pemda Kutai Timur dalam meningkatkan pendidikan inklusif di sekolah luar biasa," *Netizens.id*, 2025. [Online]. Available: <https://www.netizens.id/10355/advertorial/komitmen-pemda-kutai-timur-dalam-meningkatkan->

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 26 No. 4 (2025): October

DOI: 10.21070/ijins.v26i4.1824

- pendidikan-inklusif-di-sekolah-luar-biasa.html
11. S. Handayani, "Analisis persepsi guru SD di Kabupaten Malang terhadap kebijakan pendidikan inklusif," *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2020.
 12. I. Hasmyati, U. Hasanah, and Zainuddin, "Persepsi dan kesiapan guru di daerah lain terkait pendidikan inklusif," *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, 2022.
 13. A. Kurniawan and R. Situmorang, "Pendidikan inklusif: Konsep dan implementasi di sekolah dasar," *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 15–28, 2023.
 14. P. D. Sari, H. Nugroho, and Y. Wibowo, "Pendekatan inklusif dalam pendidikan dasar: Menghilangkan hambatan belajar," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 8, no. 2, pp. 102–115, 2022.
 15. I. G. A. Putra and M. Lestari, *Pendidikan Inklusif di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2021.
 16. S. Rahayu and B. Santoso, "Layanan pendidikan inklusif di sekolah reguler: Studi kasus dan rekomendasi kebijakan," *Jurnal Pendidikan Multikultural*, vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2024.
 17. B. Santoso, *Psikologi Persepsi dalam Konteks Pembelajaran*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
 18. M. D. Putri and H. Setiawan, "Persepsi individu terhadap perubahan sosial: Kajian psikologi sosial," *Jurnal Psikologi Indonesia*, vol. 9, no. 1, pp. 45–56, 2022.
 19. A. Firmansyah, "Memahami persepsi guru dan siswa dalam konteks pendidikan," *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, vol. 4, no. 1, pp. 15–28, 2024.
 20. T. Loreman et al., *Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom*. London: Routledge, 2010.
 21. E. Avramidis and B. Norwich, "Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature," *European Journal of Special Needs Education*, 2002.
 22. U. Sharma, C. Forlin, and T. Loreman, "Impact of training on pre-service teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities," *Disability & Society*, 2008.
 23. UNESCO, *Education for All: Inclusive Education*, 2010. [Online]. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000161565_eng
 24. "Artikel Istoria," *Jurnal UNY*, [Online]. Available: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/11052/8228>
 25. UNESCO, *Inclusion in Education*, 2024. [Online]. Available: <https://www.unesco.org/en/inclusion-education>
 26. L. Florian and K. Black-Hawkins, "Exploring inclusive pedagogy," *British Educational Research Journal*, vol. 37, no. 5, pp. 813–828, 2011, doi: 10.1080/01411926.2010.501096.
 27. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, 2022. [Online]. Available: <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
 28. T. Loreman et al., *Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom*. London: Routledge, 2010.
 29. D. W. Pratiwi and Sukartono, "Persepsi guru terhadap tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan inklusi," *ResearchGate*, 2025. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/391636989_Persepsi_Guru_Terhadap_Tantangan_dan_Peluang_dalam_Implementasi_Pendidikan_Inklusi
 30. M. Mirnawati, A. Rachman, and A. Warni, "Persepsi guru terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Banjarmasin," *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, vol. 15, no. 27, pp. 61–66, 2019, doi: 10.36456/bp.vol15.no27.a1789.
 31. M. K. Wardhani, "Persepsi dan kesiapan mengajar mahasiswa guru terhadap anak berkebutuhan khusus dalam konteks sekolah inklusi," *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 10, no. 2, pp. 152–161, 2020, doi: 10.24246/j.js.2020.v10.i2.p152-161.